

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam alam semesta terdapat suatu tempat yang dimana seluruh makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, serta seluruh isi dari alam semesta yang saling berkaitan dan berhubungan serta membangun suatu habitat yang saling mempengaruhi kehidupan satu dengan lain yang disebut dengan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup dapat terjadi dikarenakan dua hal diantaranya faktor alam dan faktor non alam. Faktor non alam dapat terjadi disebabkan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor manusia seperti pembuangan sampah secara berlebihan, pencemaran air sungai, banjir, dan masih banyak lagi. Hal tersebut dapat menjadi penilaian jikalau kerusakan alam dari faktor ulah manusia lebih banyak daripada kerusakan alam daripada faktor alam itu sendiri.

Kualitas dari pembangunan lingkungan hidup di dunia sangat didorong oleh tindakan masyarakat yang menilai lingkungan hidup disekitarnya. Salah satu penyebab yang dapat memengaruhi lingkungan hidup yaitu perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat tiap tahunnya. Peningkatan jumlah masyarakat tentunya berimbas pada berkembangnya laju timbulan sampah. Oleh karenanya, jumlah sampah yang meningkat karena kegiatan masyarakat yang juga kian meningkat. Sampah kerap menjadi kendala utama pada kota-kota metropolitan di dunia termasuk Indonesia hingga saat ini. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

bahwa sampah merupakan hasil dari sisa kegiatan setiap hari dari manusia dan/atau proses alamiah yang berwujud padat. Sementara itu, sampah juga hasil aktivitas sisa dari kehidupan setiap hari atau proses alam yang termasuk sampah organik padat dan anorganik yang memiliki sifat dapat diurai (*biodegradable*) serta tidak dapat diurai (*nonbiodegradable*) yang sudah dianggap tak digunakan lagi sehingga berakhir di lingkungan. Sampah memiliki manfaat bagi lingkungan jika dikelola secara baik, akan tetapi sampah juga memiliki dampak buruk bagi manusia serta lingkungan jika tidak dapat dikelola dengan bijak. Hasil dari sampah yang tidak dikelola dengan bijak tentunya dapat mempengaruhi lingkungan sehingga diperlukan adanya pengolahan sampah dengan tujuan meminimalisir jumlah sampah serta memanfaatkan kembali sampah sehingga tidak merusak ekosistem alam.

Sampah menjadi masalah yang kerap dialami oleh beberapa negara di dunia dikarenakan sifatnya yang susah untuk diuraikan. Menurut World Bank dalam laporan yang berjudul *What a Waste 2.0* (Kaza, 2018), dunia dapat menghasilkan 2.01 miliar ton sampah padat diperkotaan tiap tahunnya dan setidaknya terdapat 33% sampah yang tidak terkelola dengan baik. World Bank memprediksi bahwa jumlah sampah global akan mengalami peningkatan sebanyak 70% atau 3.40 miliar ton sampah per tahunnya. World Economic Forum (WEF) juga memprediksi pada tahun 2050, total sampah plastik yang ada akan melebihi jumlah total ikan serta sampah plastik akan meningkat 3 (tiga) kali lipat secara global menjadi 1.124 miliar ton. Hal ini disebabkan karena rendahnya penerapan gaya hidup masyarakat yang ramah lingkungan, tingginya penggunaan barang sekali pakai dan beberapa kegiatan kurang bijak lainnya yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Tanpa adanya upaya yang bijak dan benar dalam pengendalian

pengelolaan sampah, akibatnya sampah akan menimbulkan masalah yang besar bagi kota-kota metropolitan diseluruh dunia (Cao, 2017).

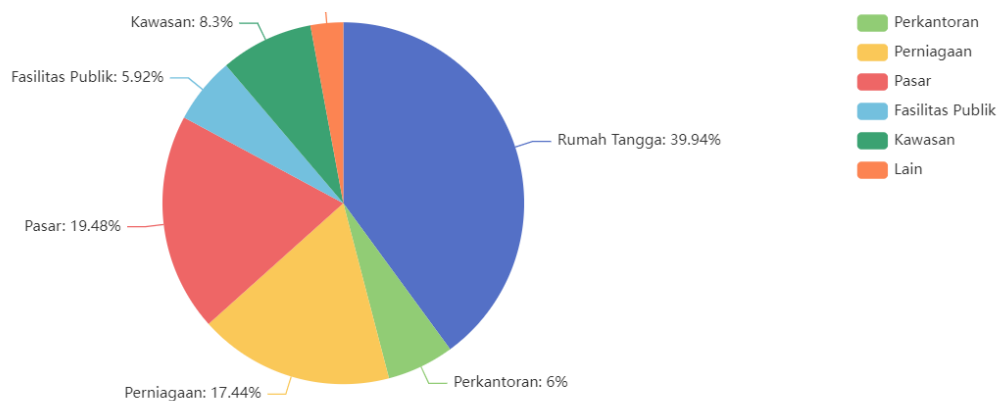
Sampah seringkali menjadi permasalahan yang tak asing ditelinga masyarakat dikarenakan sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana banjir. Penyebab terjadinya banjir yakni kurang pedulinya masyarakat terhadap lingkungan dengan tetap membuang sampah secara sembarang baik di jalan hingga ke tepi sungai. Banyak dari sebagian masyarakat yang membuang jenis sampah tanpa memilahnya terlebih dahulu meskipun terdapat jenis sampah yang bisa digunakan manfaatnya kembali sehingga jumlah timbulan sampah mengalami penurunan.

Permasalahan sampah yang mengkhawatirkan ini juga dialami di Indonesia. Permasalahan sampah yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan masalah yang menjadi mimpi buruk negara selama bertahun-tahun. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada tahun 2023 diketahui bahwa masyarakat Indonesia menghasilkan jumlah timbulan sampah sebanyak 19 juta ton/tahun. Hal ini diiringi dengan peningkatan jumlah masyarakat, adanya peralihan perilaku konsumsi masyarakat, dan pola tingkah laku dari masyarakat sehingga terjadi kenaikan jumlah timbulan sampah berdasarkan jenis serta keragaman karakteristik tiap sampah.

Banyaknya kegiatan yang dilakukan masyarakat tentunya menimbulkan dampak bagi kebersihan lingkungan hidup. Akibat konsekuensi dari aktivitas masyarakat yaitu semakin meningkatnya jumlah sampah yang diproduksi dari bahan-bahan habis pakai ataupun bahan-bahan yang sudah tak digunakan kembali dan berasal dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya serta berada diperkotaan. Sebagaimana dijelaskan oleh KLHK, pada tahun 2023 penyumbang sampah

terbesar merupakan sampah sisa makanan sebanyak 41.9% dan disusul dengan sampah plastik sebanyak 18.5%. Selain itu, sumber sisa sampah terbanyak berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, dan pusat perniagaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan minimnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Gambar 1. 1. Komposisi Sampah Berdasarkan Sumber Sampah secara Nasional Tahun 2023



Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional, 2024

Pada gambar 1.1. ditunjukkan sumber-sumber sampah yang dihasilkan secara nasional sangat beragam. Berdasarkan data-data sumber sampah pada tahun 2023, sampah rumah tangga menjadi sorotan sebagai penyumbang sampah terbanyak bagi timbulan sampah di Indonesia. Menurut Hasibuan (Hasibuan, 2016) sampah rumah tangga yakni sampah yang bersumber pada aktivitas masyarakat selama di rumah. Sampah rumah tangga adalah limbah dari rumah tangga atau sampah yang bersumber dalam kegiatan masyarakat setiap hari dari rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga ini bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang sudah tak digunakan lagi serta dianggap sudah tidak memiliki manfaat yang dihasilkan.

Permasalahan sampah rumah tangga kerap menjadi serius dikarenakan sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbanyak di lingkungan. Sehingga diperlukan upaya pengelolaan sampah secara optimal untuk menjawab permasalahan sampah. Bentuk upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan meninggalkan pola lama berupa angkut buang dalam pengolahan sampah rumah tangga menjadi pengelolaan sampah yang mengimplementasikan 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) (Fauziah, 2021).

Pemerintah telah berupaya keras untuk meminimalisir jumlah timbulan sampah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang diantaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pentingnya pengelolaan sampah sangat diperlukan guna menekan jumlah timbulan sampah. Pengelolaan sampah sendiri merupakan usaha dan upaya yang termasuk dalam mengumpulkan, mengurangi, menimbun sampah, memindahkan, menyimpan sementara, serta mengolah sampah. Pada pengelolaan sampah sangat dibutuhkan adanya payung hukum, kepastian tanggung jawab dan wewenang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keikutsertaan masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan maksimal. Dijelaskan juga pada Pasal 4 bahwa pengelolaan sampah memiliki tujuan untuk menaikkan kebugaran dari masyarakat, tingkat lingkungan hidup dan menghasilkan sampah sebagai mata pencaharian.

Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, definisi bank sampah adalah sarana prasarana yang digunakan untuk mengendalikan sampah dengan menggunakan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) sebagai sarana bimbingan pengetahuan, peralihan tindakan masyarakat pada pengendalian sampah, dan melaksanakan ekonomi sirkular yang dirancang serta

dilakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan bank sampah merupakan rekayasa sosial yang memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada aktivitas memilah sampah berdasarkan jenisnya. Bank sampah merupakan salah satu strategi yang bertujuan untuk menumbuhkan dan membangun sikap peduli masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga sampah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Tingkat partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dari program bank sampah dikarenakan bank sampah merupakan aktivitas sosial dan dilakukan secara sukarela. Program bank sampah mengajak keseluruhan masyarakat untuk sadar dan peduli pada lingkungan hidup sehingga sampah bisa dijadikan sebagai barang yang memiliki nilai manfaat dan nilai ekonomis. Adanya pengendalian sampah melalui program bank sampah akan memberikan dampak yang cukup signifikan mengenai permasalahan sampah terkhususnya sampah rumah tangga. Sehingga sangat diperlukan suatu kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengelola sampah menjadi lebih bijak.

Pemerintah telah melakukan banyak upaya dalam menekan pengelolaan sampah terutama sampah jenis plastik. Namun kenyataannya, upaya tersebut belum dapat menurunkan angka timbulan sampah plastik. Akibat dari padatnya penduduk Indonesia serta tidak terorganisirnya sampah dengan baik, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan dalam mengelola sampah pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Meningkatnya jumlah timbulan sampah plastik tidak dapat diimbangi dengan tingkatnya kesadaran dari masyarakat pada alam semesta. Indonesia sempat berada pada

peringkat kedua dengan gelar negara penyumbang sampah plastik di dunia (Yulianti, 2024). Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang banyak dan luas serta lebih banyak zona laut daripada zona daratan sehingga hal ini menyebabkan banyaknya sampah plastik hingga sampai di laut. Sampah plastik yang berasal dari Indonesia berakhir terbang ke lautan sebanyak 187.2 juta ton dan disusul oleh China yang menyetorkan sampah sebanyak 262.9 juta ton (Dias et al., 2024). Sampah domestik bersumber pada aktivitas rumah tangga yang menjadi salah satu penyokong sampah plastik. Penyebabnya adalah sikap tidak peduli masyarakat terhadap limbah plastik disekitar sehingga menjadi pondasi terhadap peningkatan jumlah limbah plastik di Indonesia.

Pemerintah terus berupaya dengan melakukan gerakan mengurangi plastik atau *placticless* dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi jumlah sampah plastik di masyarakat. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban dalam mengelola sampah tersebut dengan membuat regulasi atau kebijakan larangan membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Namun kebijakan mengenai pengelolaan sampah plastik secara keseluruhan belum terlaksana di setiap daerah.

Letak Ibu kota di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang yang dimana pusat perkotaan dan pemerintahan berjalan. Banyaknya kawasan industri serta padatnya penduduk di Kota Semarang menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. Kota Semarang menjadi satu diantara dari daerah di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam peringkat 6 dari 10 besar kota di Indonesia sebagai penyumbang timbulan sampah tahunan terbanyak di 2023 (Rasyid, 2024). Hal ini semakin diperparah dengan kondisi minimnya kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup. Dari data BPS yang didapatkan,

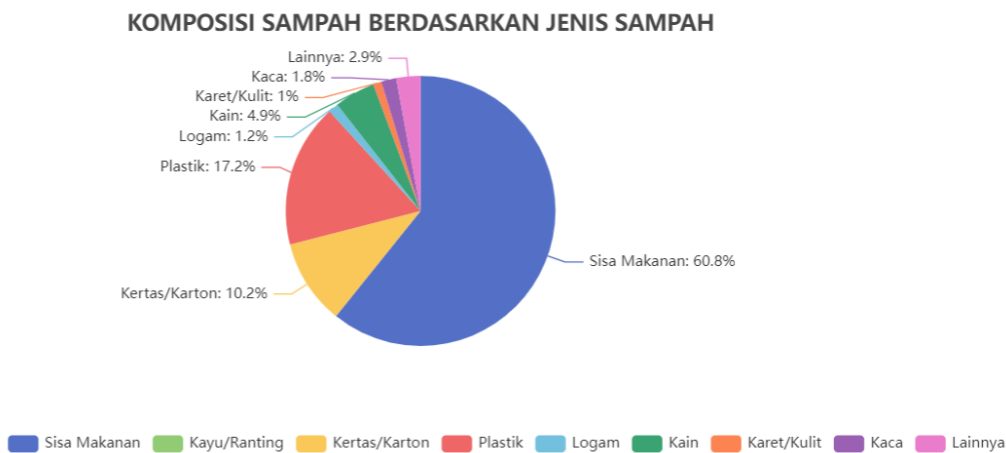
Kota Semarang sempat mengalami kenaikan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2022.

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2017-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	2017	1.753.092
2.	2018	1.786.114
3.	2019	1.814.110
4.	2020	1.653.524
5.	2021	1.656.564
6.	2022	1.659.975

Sumber: BPS Kota Semarang, 2022 (diolah)

Gambar 1. 2. Komposisi Sampah Berdasarkan Jenis di Kota Semarang Tahun 2023



Sumber: SIPSN, 2024

Berdasarkan pada gambar 1.2. maka dapat disimpulkan bahwa komposisi sampah berdasarkan jenis sampah di Kota Semarang (2023) masih didominasi oleh sampah sisa makanan sebesar 60.8%, disusul sampah plastik sebesar 17.2%, dan sampah

kertas/karton sebesar 10.2%. Hingga saat ini, sampah plastik masih digunakan oleh masyarakat dalam aktivitas sehari-hari dikarenakan memiliki harga yang terjangkau, ringan, dan tidak mudah rusak. Namun dikarenakan plastik yang bersifat *nonbiodegradable* menjadikannya sebagai kontributor limbah yang bersifat merusak lingkungan.

Tabel 1. 2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Semarang
Tahun 2020-2023

No	Tahun	Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)	Sampah Dikelola Tahunan (ton/tahun)	Daur Ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)
1.	2020	431.534,65	116.925,38	311.128,14	428.053,52	47.116,09
2.	2022	431.081,22	112.236,98	316.042,92	428.279,89	21.987,81
3.	2023	466.010,79	104.905,07	349.823,90	454.728,97	28.947,53

Sumber: SIPSN, 2024 (diolah)

Menurut tabel 1.2 produksi timbulan sampah pada Kota Semarang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pengelolaan sampah di Kota Semarang diketahui Pemerintah Kota Semarang bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang telah berupaya untuk mengurangi jumlah timbulan sampah sebesar 25.21%. Besarnya jumlah timbulan sampah yang berada di Kota Semarang menunjukkan bahwa kesadaran dan antusiasme masyarakat dalam pemilahan sampah terbilang masih rendah. Lemahnya kesadaran masyarakat pada lingkungan hidup mengakibatkan masyarakat membuang sampah secara sembarangan sehingga pada akhirnya mereka sendiri yang menjadi korban

dari tindakan tersebut. Tumpukan sampah yang dibiarkan lama-kelamaan akan menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara yang memberikan dampak negatif bagi makhluk hidup.

Sementara itu, pada September 2023 telah terjadi kebakaran sampah di TPA Jatibarang Kota Semarang. Penyebab terjadinya kebakaran di TPA Jatibarang dikarenakan bara api yang masih menyala pada timbunan sampah yang berakibat adanya kebakaran pada titik zona 2 serta titik zona 3 yang dimana zona tersebut zona aktif di TPA Jatibarang. Penyebab munculnya kobaran api dikarenakan adanya gas metana yang bersumber pada sampah organik serta sampah anorganik yang mudah tersulut api apabila terkena panas (Purbaya, 2023). Akibat dari kondisi ini, proses pengelolaan sampah menjadi terhambat sehingga dibutuhkan perhatian bersama dan langkah yang nyata untuk mengurangi jumlah timbunan sampah.

Berdasarkan masalah sampah yang terjadi di Kota Semarang dan untuk mengatasi jumlah sampah plastik, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Sampah Plastik dengan fokus untuk mengendalikan penggunaan plastik. Dijelaskan pada pasal 2 yang berbunyi “Pengendalian penggunaan plastik bertujuan mengendalikan sampah plastik dari sumber penghasil sampah. Pengendalian bertujuan meminimalisir pencemaran dan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, meningkatnya partisipasi serta kesadaran masyarakat, mengurangi sampah rumah tangga dan sejenisnya, dan menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup”. Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengganti kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan atau *totebag* atau tas *reusable*.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dapat menjadi awal dalam upaya mengendalikan serta mengurangi penggunaan plastik di Kota Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan DLH Kota Semarang, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terbatasnya akses serta kecukupan data mengenai data pengendalian sampah plastik, kurangnya inovasi dalam pengelolaan sampah plastik, kurang tegasnya pemerintah dalam memberikan sanksi administrasi, serta kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masih dijumpai UMKM penjual makanan dan minuman, cafe, restoran, maupun hotel yang masih belum dapat menerapkan pengendalian penggunaan plastik. Selain UMKM, dijumpai pula pasar tradisional yang setiap melakukan transaksi menggunakan kantong plastik secara bebas. Sesuai dengan arahan Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pada pasal 5 bahwa masyarakat harus membantu untuk mengurangi pemakaian kantong plastik, pipet minum plastik, dan *styrofoam* serta mulai diganti dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Namun banyak dijumpai masyarakat yang menggunakan salah satu dari ketiga barang tersebut. Jika ketiga barang tersebut secara terus-menerus digunakan maka dapat diprediksi angka sampah plastik akan meningkat secara drastis.

Melihat permasalahan plastik yang ada di Kota Semarang, sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengelolaan plastik. Berdasarkan Perwali Nomor 27 Tahun 2019, DLH Kota Semarang mengajak dunia industri/usaha dan masyarakat untuk mengendalikan penggunaan plastik dalam rangka menekan jumlah timbulan sampah plastik. Partisipasi masyarakat (Nugraha, 2018) adalah keikutsertaan masyarakat dalam menentukan suatu arah dan strategi kebijakan, ikut andil dalam melaksanakan kegiatan serta menghasilkan manfaat secara merata. Partisipasi masyarakat

memiliki peranan yang penting untuk menciptakan pengendalian plastik secara menyeluruh sehingga memunculkan kesadaran masyarakat dimulai dari lingkup rumah tangga. Notoatmodjo (Notoatmodjo, 2007) memaparkan partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seluruh masyarakat dalam mengatasi segala persoalan yang terjadi dilingkup masyarakat itu sendiri. Setiap salah satu dari masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusi. Kontribusi ini dapat berupa kontribusi dalam pemikiran/ide, finansial, tenaga/daya yang dapat diimplementasikan dalam bentuk 4M yaitu *man power*, *money*, *material*, dan *mind*.

Sesuai dengan arahan Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 yang menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dijelaskan pada Perwali Semarang Nomor 27 Tahun 2019 pasal 5 ayat (2) bahwa dalam pengelolaan sampah, masyarakat berperan untuk mengurangi pemakaian penggunaan kantong berbahan plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dengan memanfaatkan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali dan ikut serta dalam sosialisasi pengendalian plastik seperti memberikan pendapat, kritik, usul, saran, dan pertimbangan pada upaya untuk meningkatkan pengolahan sampah di daerah setempatnya. Selain itu, masyarakat memiliki hak untuk ikut serta partisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup.

Menurut data yang didapatkan melalui SIPSN, keberadaan bank sampah di Kota Semarang tercatat bahwa pada tahun 2023 Kota Semarang memiliki 41 BSU (bank sampah unit) dan 1 BSI (bank sampah induk) yang secara keseluruhan dikelola oleh masyarakat. Dengan kehadiran bank sampah diharapkan dapat menekan timbulan sampah di Kota Semarang.

Tabel 1. 3. Bank Sampah Unit Kota Semarang Tahun 2023

No	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah Masuk (kg/tahun)	Sampah Terkelola (kg/tahun)
1.	BS BERKAH	BSU	4.233,60	4.233,60
2.	AMANAHAH	BSU	43.596,00	43.596,00
3.	BS BAROKAH	BSU	3.732,00	3.732,00
4.	BS WIJAYA KUSUMA	BSU	756,00	756,00
5.	Bank Sampah Unit MELATI	BSU	33.679,40	33.679,40
6.	BS MAKMUR SEJAHTERA	BSU	3.528,00	3.528,00
7.	Bank Sampah Unit MAWAR	BSU	53.612,40	53.612,40
8.	WIJAYA KUSUMA	BSU	2.124,00	2.124,00
9.	Bank Sampah Unit MELATI PUTIH	BSU	4.998,00	4.998,00
10.	BS BUNGA TEROMPET	BSU	2.508,00	2.508,00
11.	Bank Sampah Unit RAFLESIA	BSU	24.664,20	24.664,20
12.	BS MANGGA	BSU	6.792,00	6.792,00
13.	Bank Sampah Unit GEDAWANG ASRI	BSU	97.468,92	97.468,92
14.	BS BAROKAH	BSU	6.096,00	6.096,00
15.	Bank Sampah Unit PAYUNG LESTARI	BSU	70.027,20	70.027,20
16.	BS SERUNI TANDANG	BSU	7.614,00	7.614,00
17.	Bank Sampah Unit MEKAR SARI	BSU	2.616,00	2.616,00
18.	BS BIDADARI	BSU	46.992,00	46.992,00
19.	Bank Sampah Unit LUMINTU	BSU	16.360,80	16.360,80
20.	BS ARTO MORO	BSU	2.388,00	2.388,00
21.	Bank Sampah Unit MUGI BERKAH	BSU	9.744,00	9.744,00
22.	Bank Sampah Unit SERUNI	BSU	4.908,00	4.908,00
23.	Bank Sampah Unit LESTARI	BSU	4.440,00	4.440,00
24.	Bank Sampah Unit MANDIRI 7	BSU	3.549,00	3.549,00
25.	Bank Sampah Unit SEROJA ROWOSARI	BSU	9.360,00	9.360,00

No	Nama Fasilitas	Jenis	Sampah Masuk (kg/tahun)	Sampah Terkelola (kg/tahun)
26.	Bank Sampah Unit SUMBER REJEKI	BSU	7.951,20	7.951,20
27.	Bank Sampah Unit PENTUL ASRI	BSU	2.968,80	2.968,80
28.	Bank Sampah Unit ARTA LESTARI	BSU	12.063,36	12.063,36
29.	Bank Sampah Unit SAMBER REJEKI	BSU	3.093,00	3.093,00
30.	Bank Sampah Unit AJIGUNA	BSU	38.144,08	38.144,08
31.	Bank Sampah Unit KAMPUNG GO GREEN NGISOR ASEM (K3G)	BSU	3.670,20	3.670,20
32.	Bank Sampah Unit MELATI 03	BSU	2.902,80	2.902,80
33.	Bank Sampah Unit MAKMUR JAYA	BSU	3.252,00	3.252,00
34.	BS LESTARI RW 06	BSU	19.272,00	19.272,00
35.	BS BERKAH MAKMUR	BSU	19.584,00	19.584,00
36.	BS BERKAH BAROKAH MIJEN HARMONI	BSU	8.262,60	8.262,60
37.	BS DAWIS MAWAR 2	BSU	4.941,00	4.941,00
38.	BS REKAT	BSU	3.654,00	3.654,00
39.	BS JATI RESIK	BSU	2.256,00	2.256,00
40.	BS FLAMBOYAN	BSU	3.336,00	3.336,00
41.	BS BARKOD	BSU	3.360,00	3.360,00

Sumber: SIPSN, 2024

Dari sekian bank sampah di Kota Semarang, dapat ditemukan gap empiris dari permasalahan bank sampah yang menunjukkan bahwa Bank Sampah Gedawang Asri memiliki jumlah timbulan sampah masuk terbanyak di Kota Semarang sebanyak 97.468,92 kg/tahun sehingga peneliti menjadikan Bank Sampah Unit Gedawang Asri sebagai lokus penelitian. Bank Sampah Unit Gedawang Asri menaungi 10 (sepuluh) bank sampah dari RW 01 hingga RW 10 Tejosari 2, Kelurahan Gedawang, Kecamatan

Banyumanik. Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang meresmikan Bank Sampah Unit Gedawang Asri yang menerapkan 4 (empat) tujuan utama diantaranya ibadah terhadap Allah SWT, lingkungan hidup (menjaga kelestarian alam semesta), sosial (bermasyarakat) dan finansial (meningkatkan pendapatan). (Bella, 2022)

Melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan keterangan bahwa terdapat permasalahan atau *gap evidence* yang ada di Bank Sampah Unit Gedawang Asri diantaranya munculnya peningkatan jumlah timbulan sampah meskipun sudah ada bank sampah, kurang kesadaran dari masyarakat akan manfaat pengelolaan sampah melalui bank sampah, minimnya keikutsertaan partisipasi masyarakat terhadap musyawarah penentuan rencana program kerja pengelolaan sampah, dan pemikiran dari masyarakat yang masih keliru terkait kegiatan pemilahan dan pengelolaan bank sampah.

Selain *gap evidence*, juga ditemukan *gap* teoritik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri bahwa dalam proses partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah plastik di Bank Sampah Unit Gedawang Asri dinilai minim keterlibatan dari masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan melalui hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan bank sampah. Masih dijumpai beberapa masyarakat yang tidak menyetorkan hasil pemilahan sampah ke bank sampah melainkan kepada pengepul lainnya serta masih beberapa masyarakat yang dinilai pasif dalam melakukan kegiatan pemilahan sampah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Bank Sampah Unit Gedawang Asri, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Proses Partisipasi**

**Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Plastik di Kota Semarang
(Studi pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri Kelurahan Gedawang)”.**

1.2. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dipaparkan, maka penulis pada penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kota Semarang?
- b. Apakah terdapat faktor-faktor yang memengaruhi proses partisipasi masyarakat dalam kebijakan pengendalian plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Menganalisis proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik yang terjadi pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kota Semarang.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penulisan

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diinginkan dari hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi referensi atau sumber pustaka untuk penelitian sejenis yang akan datang. Diharapkan hasil penelitian ini juga mampu meningkatkan pengetahuan serta dijadikan bahan rujukan bagi pembaca sehingga masih dapat dikembangkan untuk penelitian berikutnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis bisa meluaskan wawasan serta pengetahuan yang dimiliki oleh penulis pada saat kegiatan belajar selama periode perkuliahan berlangsung.

2) Bagi Instansi Terkait

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, peneliti bisa memberi upaya serta sudut pandang dari pihak luar organisasi terkait bagaimana kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian ini juga bisa memberikan informasi kepada pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dan pengelola Bank Sampah Unit Gedawang Asri dalam mengambil keputusan. Diharapkan penelitian dapat mengajak masyarakat untuk ikut partisipasi dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik.

3) Bagi Pembaca

Diharapkan pembaca dapat memperoleh ilmu pengetahuan tambahan mengenai pengelolaan plastik serta kebijakan pengendalian plastik di Kota Semarang.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 4. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tiara Khairina Bella, Nina Widowati, Maesaroh (2022)	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Bank Sampah “Gedawang Asri” Kelurahan Gedawang Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data dan menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menggunakan teori pemberdayaan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto	Berdasarkan teori tahapan pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa ketiga tahapan pemberdayaan di Bank Sampah Gedawang Asri belum beroperasi dengan baik serta terdapat faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi ketiga tahapan tersebut.	Letak perbedaan di teori yang digunakan. Penelitian menggunakan teori tahapan pemberdayaan sedangkan peneliti menekankan terhadap teori partisipasi masyarakat.
2.	Kiki Oktaviana, Hardi Warsono, Endang Larasati Setianingsih (2022)	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang	Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Menggunakan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff	Penelitian menunjukkan hasil bahwa masyarakat cukup berpartisipasi pada pengambilan keputusan, namun pada implementasinya, pemanfaatan hasil dan evaluasi belum optimal. Tingkatan partisipasi masyarakat berada pada derajat semu (<i>tokenism</i>). Faktor pendorong partisipasi masyarakat adalah	Letak perbedaan pada lokus penelitian yang dimana penelitian ini berfokus di Bank Sampah Apik di Kelurahan Langensari sementara peneliti melakukan penelitian di Bank Sampah Gedawang Asri Kelurahan Gedawang.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				pengetahuan, dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat, SDM bank sampah yang kompeten serta perolehan insentif, sedangkan faktor penghambat yaitu pekerjaan dan keterbatasan sarana prasarana.	
3.	Kiki Pamilutsih, Dwi Sadono, Endang Sri Wahyuni (2020)	Tingkat Partisipasi Masyarakat dan Keberlanjutan Pengelolaan Bank Sampah di Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal	Menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan 50 responden dan dianalisis menggunakan uji korelasi <i>Rank Spearman</i> . Teori yang digunakan adalah teori faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat menurut Posmaningsih	Hasil penelitian adalah anggota Bank Sampah cukup berpartisipasi dalam pengelolaan sampah namun pada tahap perencanaan dan evaluasi masih kurang. Faktor yang berkaitan dengan tingkat partisipasi masyarakat yaitu tingkat pendidikan non-formal, dukungan pemerintah, pengadaan sarpras, serta perolehan insentif.	Perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan.
4.	Shafiera Amalia (2020)	Faktor yang Menghambat Partisipasi Masyarakat pada Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta	Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan baru terdapat 18.855 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 14,6% dari 129.252 KK di Kota Yogyakarta yang menjadi nasabah bank sampah.	Penelitian ini berfokus terhadap faktor-faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat pada program bank sampah.
5.	Novia Wirna Putri, Fitriyani, Trif Vando Rahmalber,	Pengetahuan, Sikap dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan	Penelitian ini merupakan jenis penelitian observational analitik	Penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan pengetahuan dan sikap dengan	Penelitian ini berfokus menggunakan metode penelitian kuantitatif observasional analitik

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Dea Devina Falikha, Syafa Indah Tafsia, Suci Dwi Setiawati (2023)	Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik sebagai Upaya Mengurangi Sampah Plastik di Kota Padang	dengan pendekatan <i>crossectional</i> serta menggunakan sampel sebanyak 180 responden.	partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan pengurangan kantong plastik sebagai upaya mengurangi sampah plastik di Kota Padang. Pemerintah perlu merangkul masyarakat untuk menekan jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Selain itu perlu diadakannya sosialisasi dalam bentuk kampanye positif tentang budayakan membawa tas belanja yang ramah bagi lingkungan.	dengan pendekatan <i>crossectional</i> . Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.
6.	Annis Fathonah Rahmawati, Utamiyatul Chomsah, Adhlin Nazir, Robiatus Solehah, Afriyanto, Siti Aminatul Maulah, Ali Affan, Zudha Asmarani, Hasan Budiyanto, Silvia Witri (2019)	Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan melalui Pemanfaatan Pengelolaan Sampah Plastik	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui metode studi pustaka	Penelitian menunjukkan hasil bahwa tingkat masyarakat yang tinggi dan ingin belajar bersama dalam mengelola daur ulang sampah plastik menunjukkan masyarakat tersebut memiliki wawasan yang baik.	Penelitian ini berfokus dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui metode studi pustaka dan tidak terdapat teori yang dipaparkan.
7.	Akyas Aryan Permana, Drs. Ahmad Taufiq,	Analisis Implementasi Pengelolaan Dan	Menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data	Penelitian menunjukkan hasil bahwa secara umum implementasi dari Peraturan Walikota Nomor 27	Penelitian ini membahas fokus Pemerintah Kota Semarang melalui DLH Kota Semarang

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	M.Si., Dra. Puji Astuti, M.Si (2022)	Pengendalian Sampah Plastik di Kota Semarang	menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan.	Tahun 2019 belum terlaksana dengan baik.	dalam menekan penggunaan plastik di Kota Semarang.
8.	Wahyu Setyaningsih, Hadiyanto, Thomas Triadi Putranto (2022)	Improvement of Waste Management Through Community Awareness of Plastic Controlling in Garang Watershed, Semarang City, Indonesia	Penelitian ini merupakan penelitian metode campuran eksploratif sekuensial yang melibatkan 175 responden dari masyarakat sungai Garang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, kuesioner terbuka dan wawancara mendalam.	Penelitian menemukan hasil bahwa ditemukan kurang dari 40% masyarakat menjual sampah plastiknya ke bank sampah dan sisanya dibakar atau ditinggalkan di lahan kosong atau sungai. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai sampah plastik meningkatkan kontaminasi di sungai yang kemungkinan besar menghasilkan mikroplastik. Perilaku membuang sampah sembarang di sungai Garang berkorelasi dengan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran eksploratif dengan melibatkan 175 responden.
9.	K Q Ain, M A Nasri, M N Alamsyah, M D R Pratama, T Kurniawan (2021)	Collaborative Governance in Managing Plastic Waste in Bali	Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka. Menggunakan teori collaborative	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif pada pengelolaan sampah plastik di Bali dan landasan hukum telah berjalan dengan baik namun partisipasi	Penelitian ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah plastik di Bali.

No	Penulis/Tahun	Judul	Metode dan Teori Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			governance menurut Ansell dan Gash	masyarakat masih kurang karena belum terbentuknya tujuan antar aktor. Tingginya jumlah sampah plastik di laut Bali juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat yang saling pengertian.	
10.	Joana Carlos Bezerra, Tony Robert Walker, Andrea Clayton, Issahaku Adam (2021)	Single-use Plastic Bag Policies in the Southern African Development Community	Menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data studi pustaka.	Penelitian menunjukkan hasil bahwa kebijakan kantong plastik sekali pakai belum terlaksana dikarenakan keterlibatan masyarakat sipil yang terbatas dapat membahayakan keberhasilan kebijakan tersebut. Sebagian besar anggota Komunitas Pembangunan Afrika Selatan yang memiliki kebijakan tidak melakukan kampanye kesadaran masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan efektivitas.	Penelitian ini berfokus terhadap pengembangan dan penegakan kebijakan pengurangan kantong plastik dalam mengatasi kesenjangan

Persamaan pada penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan peneliti terdahulu yang telah dilakukan oleh Kiki Oktaviana (Oktaviana K. , 2022) yaitu menganalisis tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Apik Amanah Kelurahan Langensari Kabupaten Semarang. Sementara itu penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan diantaranya belum terdapat penelitian terkait proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik melalui bank sampah yang mengambil lokus serupa dengan penelitian penulis. Selain itu, penelitian yang dilakukan berfokus untuk membahas partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah plastik dilihat berdasarkan proses partisipasi masyarakat pada satu diantara bank sampah di Kecamatan Banyumanik yaitu Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Kelurahan Gedawang. Penelitian yang dilakukan juga akan membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan terhadap proses partisipasi masyarakat dan upaya untuk meningkatkan partisipasi tersebut.

1.5.2. Kajian Teori

1.5.2.1. Administrasi Publik

Asal usul kata administrasi bermula dari bahasa Yunani yakni *administrative* yang memiliki arti melayani serta membantu. Dalam bahasa Inggris, administrasi memakai istilah *administration* yang sebenarnya berasal dari kata “*ad*” (*intensif*) dan “*ministrare*” (*to serve*) yang memiliki arti melayani. Dengan demikian pengertian administrasi adalah membantu atau melayani dengan intensif. Sondang P. Siagian yang dikutip oleh Pasolong (Pasolong H. , 2014) menjabarkan bahwa administrasi merupakan keseluruhan dari proses tindakan bekerja sama antara dua orang atau lebih yang berdasarkan atas kersasionalan tertentu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan dalam arti sudut pandang luas, administrasi diartikan dalam bentuk kerjasama. Administrasi erat kaitannya dengan kegiatan bekerja sama yang melibatkan banyak orang atau sekelompok orang sehingga tujuan yang direncanakan bisa tercapai. Kerjasama merupakan urutan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang atau lebih secara bersama-sama, teratur serta terarah melalui pembagian tugas atau *jobdesc* berdasarkan kesepakatan bersama (Silalahi, 2013).

Sementara kata publik secara bahasa bersumber dari Inggris yakni *public* yang memiliki arti umum, rakyat, rakyat umum, dan orang banyak. Syafie mendefinisikan publik merupakan sejumlah orang atau lebih yang mempunyai kesamaan cara pikir, pendapat, harapan, sikap serta tindakan yang benar dan baik yang didasarkan terhadap nilai-nilai norma yang dimiliki (Pasolong H. , 2011). Selanjutnya, (Ruslan, 1997) mengungkapkan publik memiliki makna konotasi yang sempit dan spesifik dimana merupakan kumpulan dari individu-individu yang saling berkaitan dengan ikatan solidaritas tertentu.

Sedangkan menurut Chandler dan Plano (Keban, 2014) mengartikan administrasi sebagai suatu proses pengorganisir dan pengkoordinasian sumber daya yang ada dan kemudian diformulasikan, diimplementasikan serta dikelola menjadi sebuah keputusan melalui penetapan kebijakan publik. Chandler dan Piano juga mengartikan administrasi publik sebagai seni (*art*) dan ilmu pengetahuan (*science*) dan diarahkan guna mengelola *public affairs* serta menjalankan tugas-tugas yang sudah diterapkan. Sedangkan administrasi publik merupakan disiplin ilmu, bermaksud untuk menyelesaikan suatu persoalan-persoalan publik melalui upaya pembaharuan maupun penyempurnaan khususnya pada bidang organisasi, SDM, dan moneter.

Administrasi publik merupakan proses yang berkenaan dengan implementasi kebijakan yang dilakukan pemerintah, pengarahan kompetensi, dan penggunaan teknik tertentu, pengarahan terhadap usaha dari sejumlah orang. Administrasi publik bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan berupaya meningkatkan kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap tuntutan publik dan melembagakan penerapan manajerial agar tercipta dengan efektif, efisien dan rasional (Yuniningsih, 2019).

Thoha (Sari, 2019) administrasi publik ialah suatu kajian sistematis yang memuat perencanaan atas berbagai upaya penataan pemerintahan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*). Administrasi publik yakni suatu proses untuk memformulasikan, mengimplementasikan beberapa kebijakan maupun program dalam rangka melaksanakan kebutuhan masyarakat serta efisiensi dalam mencapai tujuan suatu negara. Felix A. Nigro bersama Lloyd G. Nigro mengungkapkan bahwa “*Public Administration is cooperative group effort in public setting. Public Administration covers all three branches: executive, legislative, and yudicative, and their interrelationships*”. Berkaitan dengan pendapat tersebut maka dapat didefinisikan bahwa administrasi publik merupakan suatu kolaborasi kelompok di lingkup pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungannya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas bisa diambil kesimpulan bahwa administrasi publik yaitu sebuah aktivitas bekerjasama yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintah yang sifatnya resmi dengan tujuan untuk menjalankan kewajiban maupun tugas sebagai seorang birokrat dalam melakukan pelayanan publik. Administrasi publik merupakan upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah (legislatif, eksekutif, dan

yudikatif) dalam merespon isu-isu yang berada di kalangan publik hingga terbentuknya suatu kebijakan yang disusun dan diimplementasikan.

1.5.2.2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (Keban, 2014) sudah terjadi enam paradigma pada administrasi negara yang diuraikan sebagai berikut.

Paradigma 1 (1900-1926) yang mulai dikenal paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Karakter utama pada paradigma ini yaitu Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Karya tulisan Goodnow yang berjudul “*Politics and Administration*” menjabarkan jika politik harus memfokuskan perhatian kepada kebijakan ataupun keputusan kemauan masyarakat sedangkan administrasi menyerahkan perhatian terhadap implementasi ataupun pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Perpisahan antara politik serta administrasi ini diwujudkan oleh perpisahan antara badan legislatif pemerintah yang bertugas mengekspresikan kemauan rakyat dengan badan eksekutif pemerintah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kemauan yang diinginkan oleh rakyat. Dalam hal ini, badan yudikatif pemerintah memiliki fungsi untuk membantu badan legislatif pemerintah dalam menentukan suatu tujuan dalam merumuskan suatu kebijakan.

Paradigma 2 (1927-1937) merupakan paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Karakter utama paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick. Paradigma ini memposisikan diri terhadap lokus birokrasi pemerintahan serta administrasi negara menempatkan diri dalam pencarian prinsip-prinsip administrasi negara. Administrasi memiliki prinsip sebagai fokus administrasi publik yang dikenal sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting*) dan bisa diterapkan dimana saja karena memiliki sifat universal. Sedangkan

untuk lokus dari administrasi publik tidak jelas karena dianggap bahwa prinsip-prinsip tersebut bisa dilaksanakan dimana saja termasuk di lembaga pemerintah. Sehingga diperoleh bahwa paradigma ini lebih menegaskan fokus dibandingkan lokus.

Paradigma 3 (1950-1970) merupakan paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Karakter utama paradigma ini adalah Morstein-Marx, seorang editor buku "*Elements of Public Administration*" di tahun 1946 yang mendiskusikan adanya perpisahan antara politik dengan administrasi sebagai suatu hal yang tidak memungkinkan atau tidak realistis. Herbert Simon memfokuskan kritiknya kepada ketidaktetapan prinsip-prinsip administrasi serta mengevaluasi jika prinsip-prinsip tersebut tidak berlaku dimana saja. Simon mempertegas bahwa pada proses perumusan kebijakan suatu negara terdapat kaitan antara administrasi negara dengan ilmu politik yang sangat kuat. Pemikiran ini akan menjadi cikal bakal perkembangan Ilmu Kebijakan Publik. Alhasil muncul suatu paradigma baru yang berpendapat jika administrasi publik merupakan ilmu politik yang lokusnya merupakan instansi pemerintah dan fokusnya menjadi hilang dikarenakan prinsip-prinsip administrasi publik yang memiliki banyak kelemahan.

Paradigma 4 (1956-1970) memposisikan administrasi publik ke dalam Ilmu Administrasi. Fokusnya ialah perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Paradigma ini memiliki dua cabang yang memiliki fokus pada pengembangan ilmu administrasi murni yang dipengaruhi terhadap disiplin psikologi sosial serta memiliki fokus kepada kebijakan publik. Penerapan orientasi ini bisa dilaksanakan dalam tahap lingkup administrasi publik dan bisnis dan diketahui bahwa paradigma ini tidak mempunyai kejelasan terhadap lokusnya.

Paradigma 5 (1970) memposisikan Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik. Pada paradigma ini memiliki adanya kejelasan pada fokus dan lokusnya, yang dimana memiliki orientasi kepada teori organisasi, teori manajemen, serta kebijakan publik serta memiliki lokus terhadap persoalan-persoalan kepentingan publik sehingga sudah jelas jika paradigma ini memiliki lokus dan fokus yang digambarkan secara jelas.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma Governance. Pandji Santosa pada buku Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance mengungkapkan bahwa tonggak utama di dalam buku paradigma ini adalah pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta. Hal tersebut menjadi perbedaan antara paradigma ini terhadap paradigma lainnya yaitu pemaparan terhadap *government* sebagai pelaksana pemerintah. Adanya peralihan dari *government* ke arah *governance* dapat menjabarkan perihal perpaduan terhadap kestabilan antara pemerintah, masyarakat madani (*civil society*) dan sektor swasta sehingga arah pengembangan paradigma ini dapat tertuju ke pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pemaparan diatas, paradigma yang pada penelitian ini masuk kedalam paradigma administrasi 6 yang dimana paradigma ini berkaitan dengan proses pengembangan ilmu administrasi publik yang disusun melalui serangkaian paradigma yang disampaikan dimana akan ada perubahan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) bersamaan dengan menyerahkan pelayanan publik yang baik serta memunculkan kinerja para pegawai demi tercapainya kepuasan masyarakat sebagai pemakai pelayanan publik. Di paradigma *governance* akan membahas bagaimana suatu negara mempunyai tugas untuk menyerahkan pelayanan sebaik mungkin terhadap

masyarakat guna tercapainya tujuan dari kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat memiliki posisi sebagai pemilik pemerintahan atau yang biasa disebut *owners of government* yang sepatutnya mampu melakukan kegiatan bersamaan demi kepentingan sesuatu yang lebih baik. Keterlibatan publik dapat menjadi suatu dialog kepada pemerintah untuk mencapai nilai dan kepentingan bersama, bukan lagi sebagai agregasi akan kepentingan pribadi.

1.5.2.3. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (Dye, 2014) menjabarkan bahwa kebijakan publik yakni “*public policy is whatever governments choose to do or not to do?*” (kebijakan publik merupakan apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan ataupun tidak untuk dilaksanakan). James E. Anderson (Anderson, 2006) mengungkapkan bahwa “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*” (kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh instansi-instansi serta pejabat pemerintah). Anderson juga beranggapan bahwa kebijakan publik yakni serangkaian tindakan yang memiliki suatu tujuan yang telah direncanakan untuk dilakukan oleh pelaku atau sekelompok pelaku untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang terjadi.

Aminullah (Muhammadi, 2001) menjabarkan bahwa kebijakan yakni tindakan guna memengaruhi target pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Sedangkan Said Zainal Abidin (Sore, 2017) mengungkapkan bahwa kebijakan publik tidak memiliki sifat spesifik serta sempit namun memiliki sifat yang sangat luas dan strategis. Sedangkan menurut Gerston, kebijakan publik merupakan upaya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah atau pejabat. Upaya-upaya ini akan dilaksanakan pada

setiap tingkatan pemerintahan dengan memiliki tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Dalam proses dari penentuan suatu kebijakan publik meliputi lima tahapan yang diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi isu-isu kebijakan publik.
- b. Melakukan pengembangan proposal kebijakan publik.
- c. Melakukan advokasi kebijakan publik.
- d. Mengimplementasikan kebijakan publik.
- e. Melakukan evaluasi kebijakan publik yang telah dilaksanakan.

Dari berbagai definisi kebijakan publik yang dipaparkan bahwa kebijakan publik yaitu perihal terkait suatu perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukan merupakan suatu pernyataan dari keinginan yang dikehendaki oleh pemerintah atau pejabat. Disamping itu, pemerintah tidak mempunyai pilihan untuk tidak melaksanakan sesuatu terkait kebijakan publik sebab hal tersebut mempunyai dampak yang sama terhadap pemerintah pada saat melaksanakan sesuatu.

1.5.2.4. Proses Partisipasi Masyarakat

Dalam bahasa Inggris, partisipasi berarti "*participation*" yang berarti mengambil bagian. Perwujudan dengan terlibatnya manusia disertai dengan mental maupun perasaan untuk tujuan tertentu demi kepentingan suatu kelompok dengan penuh tanggungjawab terhadap targetnya dapat disebut partisipasi. Notoatmodjo (Notoatmodjo, 2007) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan seluruh masyarakat pada saat menyelesaikan segala persoalan yang terjadi di lingkup masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat dituntut untuk memberikan kontribusinya. Kontribusi ini dapat berupa kontribusi dalam pemikiran/ide, finansial, tenaga/daya yang

diimplementasikan dalam 4M yaitu *man power*, *money*, *material*, dan *mind*. Sedangkan Yuliana (Yuliana I. , 2019) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat diartikan sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat secara sukarela dalam proses persiapan, pelaksanaan dan monitoring pada suatu kegiatan atau program.

Berdasarkan definisi mengenai partisipasi, terdapat 3 (tiga) indikator partisipasi yang dikemukakan oleh Marschall (Anindia, 2023) diantaranya:

- 1) Adanya forum yang bertujuan menampung partisipasi masyarakat
- 2) Kemampuan masyarakat untuk ikut dan terlibat pada setiap proses atau tahapan
- 3) Tersedianya akses untuk masyarakat guna memaparkan pendapat pada saat proses pengambilan keputusan.

Sejalan dengan indikator partisipasi menyebutkan adanya kemampuan masyarakat untuk ikut dan keterlibatan dalam proses atau tahapan partisipasi. Didukung dengan pendapat Cohen dan Uphoff (Cohen, 1980) mengenai partisipasi masyarakat. Menurut Cohen dan Uphoff (Cohen, 1980) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) dimensi dalam partisipasi pembangunan yang perlu diperhatikan yaitu partisipasi seperti apa yang terjadi (bentuk partisipasi), siapa saja yang berpartisipasi, dan bagaimana partisipasi berlangsung. Lebih lanjutnya Cohen dan Uphoff membagi bentuk partisipasi kedalam 4 (empat) tahapan, diantaranya;

1. Tahap pengambilan keputusan atau *decision making*. Pada tahap ini partisipasi berpusat pada penciptaan suatu ide, perumusan rencana dan penilaian opsi, penentuan pilihan-pilihan yang ada serta perumusan rencana untuk menerapkan opsi yang dipilih. Terdapat tiga bentuk keputusan yaitu

keputusan awal (*initial decisions*), keputusan yang sedang berlangsung (*ongoing decisions*) dan keputusan operasional (*operational decisions*).

2. Tahap implementasi atau *implementation*. Pada tahap ini terdapat 3 (tiga) cara utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi yaitu kontribusi sumber daya (penyediaan tenaga, uang tunai, barang dan informasi), partisipasi dalam administrasi dan koordinasi (keikutsertaan sebagai karyawan atau anggota asosiasi sukarela yang berperan melakukan administrasi dan mengkoordinasikan kegiatan), serta partisipasi pada kegiatan pendaftaran program.
3. Tahap pemanfaatan hasil atau *benefit*. Terdapat 3 (tiga) bentuk manfaat yang mungkin diperoleh masyarakat pada pendaftaran suatu program, yaitu materi, sosial, dan pribadi. Pada tahap pemanfaatan hasil atau *benefit*, partisipasi menjadi satu diantara dari jenis partisipasi yang lebih pasif. Pada tahap ini tidak menutup kemungkinan adanya konsekuensi bahaya yang dapat mengikuti dari partisipasinya.
4. Tahap evaluasi atau *evaluation* terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni partisipasi langsung dan tidak langsung melalui kegiatan partisipatif, kegiatan lobi melalui beberapa organisasi atau menggunakan media tertentu untuk mengkomunikasikan pandangan masyarakat pada suatu program.

Oakley (Oakley P. , 1991) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat diamati berdasarkan 5 (lima) indikator, diantaranya:

1. Kontribusi masyarakat

Kontribusi dapat dimaknai sebagai partisipasi masyarakat melalui pemikiran, dana, tenaga, dan fasilitas untuk mendukung program atau kegiatan yang dijalankan oleh pihak tertentu.

2. Pengorganisasian masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah proses pembagian kerja atau struktur organisasi sembari memperhatikan tujuan, sumber daya, serta lingkungan sesuai dengan yang dibutuhkan.

3. Peran masyarakat

Peran masyarakat merujuk pada kontribusi dan keterlibatan masyarakat secara aktif pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, atau kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat. Hal ini mencakup kontribusi dalam bentuk pemikiran, aksi, dan dukungan untuk mencapai tujuan bersama serta memajukan kesejahteraan bersama.

4. Aksi masyarakat

Aksi masyarakat mencakup tindakan nyata atau kontribusi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam melibatkan diri dalam berbagai kegiatan atau proses yang berdampak kehidupan mereka. Aksi masyarakat merupakan bentuk konkret dari partisipasi yang menunjukkan keterlibatan langsung dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini dapat berupa peran aktif dalam pengambilan keputusan, implementasi program, atau berkontribusi secara positif terhadap perkembangan masyarakat.

5. Tanggung jawab masyarakat

Tanggung jawab masyarakat merujuk pada perilaku melaksanakan suatu hal secara tekun dan sanggup menanggung kemungkinan risiko yang terjadi ketika terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, atau kegiatan lainnya yang mendorong atau menghambat kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup kesadaran akan kepentingan bersama, kontribusi positif, dan dukungan terhadap upaya bersama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

1.5.2.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Penerapan keikutsertaan masyarakat guna berpartisipasi dalam melaksanakan suatu kegiatan maupun program tentunya dapat dipengaruhi oleh beragam macam-macam faktor. Adapun faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan atau kegagalan suatu program antara lain (Oktaviana, 2022):

1. Usia

Usia atau umur menjadi satu diantara dari faktor yang dapat memengaruhi perilaku dan sikap seseorang dalam berpartisipasi pada kegiatan bermasyarakat. Umumnya kelompok masyarakat yang memiliki usia menengah ke atas mempunyai keterikatan etika yang lebih pada nilai dan norma di lingkungannya sehingga kecenderungan untuk melakukan partisipasi lebih banyak dibandingkan kelompok usia lainnya.

2. Jenis kelamin

Terdapat kecenderungan partisipasi berbeda yang diberikan antara perempuan dan pria. Hal ini disebabkan karena nilai sosial yang sudah terbentuk di masyarakat sejak dulu.

3. Pendidikan

Pendidikan seseorang erat kaitannya dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku hidup seseorang di dalam lingkungannya. Semakin tingginya latar belakang pendidikan seseorang tentunya wawasan yang dimiliki akan semakin luas.

4. Pekerjaan dan penghasilan

Penghasilan adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari pekerjaan yang dimiliki. Pekerjaan yang baik dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup bisa mendorong seseorang untuk turut melakukan partisipasi pada kegiatan kemasyarakatan. Dengan kata lain, partisipasi akan muncul apabila didukung dengan kondisi ekonomi yang mencukupi.

5. Lamanya tinggal

Seseorang yang lamanya bertempat tinggal di lingkungan tertentu akan lebih berpengalaman untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya dan berpengaruh terhadap partisipasi yang akan diberikan.

Sedangkan menurut Pamilutsih (Pamilutsih, 2020) faktor yang berkaitan terhadap partisipasi masyarakat adalah latar belakang pendidikan nonformal, dukungan dari pemerintah, pengadaan sarana dan prasarana, serta penerimaan pendapatan. Sedangkan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat (Amalia, 2020) meliputi

munculnya persaingan industri pengelolaan sampah, dan SDM pengelola yang kurang memadai.

Partisipasi masyarakat erat kaitannya dengan faktor-faktor pada pengolahan sampah di bank sampah yang dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu (Imron, 2017):

- a. Faktor internal yang dimana faktor ini bersumber dari dalam individu masyarakat. Faktor internal pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi pengetahuan dan keahlian, keinginan dalam diri masyarakat itu sendiri, pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin.
- b. Faktor eksternal yang dimana faktor ini bersumber dari luar individu masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana, dukungan pemerintah dan tokoh masyarakat, pengelola bank sampah (SDM dan metode pelayanan bank sampah) serta media massa.

1.5.2.6. Sampah

Sampah atau *waste* merupakan konsekuensi dari kegiatan masyarakat yang tidak diinginkan lagi. Sampah sebagai satu diantara dari jenis biomassa yang keberadaannya semakin hari semakin besar terutama di kota-kota besar. Sampah menurut Suryati dalam Oktaviana (Oktaviana K. , 2022) adalah sisa material dari suatu proses tertentu yang tidak diinginkan. Definisi sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 yakni suatu sisa kegiatan setiap hari dari manusia atau proses alam yang bentuknya padat. Sedangkan WHO mendefinisikan sampah sebagai suatu yang tak dipakai, tak digunakan, tak diinginkan maupun segala sesuatu buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang dengan sengaja dilakukan. Berkaitan dengan definisi sampah

yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sampah ialah sebagian sisa-sisa suatu yang tak dipakai kembali, diinginkan atau sesuatu yang harus dibuang, yang pada umumnya bersumber pada kegiatan yang dilakukan oleh manusia.

Menurut jenisnya, sampah diklasifikasikan menjadi sampah organik serta sampah anorganik. Sampah organik ialah jenis sampah yang sumbernya dari bahan-bahan hayati dan sifatnya *biodegradable* atau bisa diuraikan melalui aktivitas mikroorganisme. Sampah jenis ini menjadi penyumbang terbanyak dalam sampah rumah tangga, contohnya sampah sisa-sisa makanan, daun dan sebagainya. Sementara sampah anorganik yaitu jenis sampah yang timbul akibat bahan-bahan non hayati yang berasal dari produk sintetik ataupun bahan tambang yang memiliki sifat *non-biodegradable* atau tidak bisa diuraikan secara alami/mikroorganisme dan atau dapat teruraikan tetapi membutuhkan ratusan tahun untuk bisa teruraikan seperti plastik, botol/kaleng minuman, kaca, logam, dan sebagainya.

1.5.2.7. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mendefinisikan sebagai kegiatan yang tersistem, menyeluruh serta berkesinambungan dimana terdiri dari pengurangan serta penanganan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah ini guna menaikkan kebugaran dari masyarakat, tingkat lingkungan hidup dan menghasilkan sampah untuk mata pencaharian. Pada pasal 12, dijelaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan atau memilah sampah melalui cara atau metode yang memiliki wawasan lingkungan. Metode tersebut adalah 3R, yang diantaranya:

1. Kegiatan Membatasi Sampah (*Reduce*)

Kegiatan yang dilakukan untuk menekan segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah yang dimana tidak membiarkan tumpukan timbulan sampah secara berlebihan. Hal ini mengharuskan masyarakat untuk mengurangi pembelian produk-produk yang sudah tidak diperlukan lagi sebagai upaya mengurangi sampah secara umum.

2. Kegiatan Menggunakan Kembali (*Reuse*)

Segala kegiatan yang dimana menggunakan kembali sampah yang masih layak pakai. Kegiatan ini disebut juga sebagai bentuk usaha dari menerapkan sampah kembali dengan memakai kembali sampah-sampah tersebut tanpa melakukan suatu proses serta transformasi baru.

3. Kegiatan Mendaur Ulang (*Recycle*)

Segala aktivitas yang mengelola sampah untuk dijadikan suatu produk baru. Kegiatan ini dilakukan dengan memanfaatkan sampah secara langsung, diproses serta diolah untuk dapat dimanfaatkan kembali, kemudian diproses atau diolah kembali menjadi bahan baku.

1.5.2.8. Bank Sampah

Bank sampah atau *wasted bank* merupakan bentuk pengolahan sampah yang pertama kali dibina di Yogyakarta dan sampai saat ini telah diadopsi berbagai kota di Indonesia. Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, bank sampah merupakan suatu fasilitas yang digunakan guna mengelola sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*) sebagai sarana bimbingan pengetahuan, peralihan tindakan terhadap pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dirancang dan diatur kembali terhadap masyarakat,

badan usaha, dan pemerintah daerah. Pada prinsipnya pelaksanaan bank sampah merupakan rekayasa sosial dengan tujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat pada aktivitas memilah sampah berdasarkan jenisnya. Bank sampah merupakan langkah nyata dari suatu strategi yang bertujuan guna membangun dan menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat tentang pengelolaan sampah sehingga sampah dapat dimanfaatkan untuk memperoleh manfaat ekonomi.

Unilever (Annisa, 2016) berpendapat bahwa bank sampah merupakan sistem pengolahan sampah-sampah yang kering secara bersama dengan cara mengupayakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan tersebut. Sistem pengelolaan ini nantinya akan memilah, menampung, serta mendistribusikan sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas menabung sampah. Model pengelolaan sampah dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor dalam rangka mengurangi timbunan sampah akan menjadi keputusan yang baik untuk mengurangi laju pertumbuhan timbunan sampah yang terus meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk (Oktaviana, 2022).

Berdasarkan definisi bank sampah diatas dapat dipaparkan bahwa bank sampah adalah upaya pengolahan sampah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif dengan mengumpulkan dan memilah sampah berdasarkan jenisnya ke tempat penampungan. Pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan diolah menjadi kerajinan tangan seperti tas, tempat tisu, keranjang, serta keranjang lainnya.

1.5.2.9. Plastik dan Ancaman Kerusakan Lingkungan Hidup

Halden (Halden, 2010) menjelaskan bahwa plastik merupakan polimer dimana plastik adalah rantai molekul yang setiap rantainya terbuat dari karbon, hydrogen, oksigen

dan silicon. Untuk menggabungkan rantai tersebut dilakukan pemanasan dibawah keadaan tertentu dan dipecah kembali menjadi molekul lebih kecil yang dinamakan monomer. Kombinasi monomer yang berbeda ini menghasilkan resin plastik dengan jenis karakteristik yang berbeda. Plastik sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori diantaranya thermoset dan termoplastik. Thermoset adalah polimer yang cukup solid dan dapat diatur secara *irreversible* ketika dipanaskan sehingga membuat thermoset berguna untuk diaplikasikan dalam pembuatan mobil, konstruksi, tinta, pelapis dan perekat. Sedangkan termoplastik merupakan polimer yang molekulnya disatukan dengan ikatan yang lemah sehingga hal ini menciptakan plastik yang memiliki daya tahan yang kurang kuat dimana ketika plastik terkena panas akan mudah mencair atau meleleh. Termoplastik dibagi menjadi 7 (tujuh) tipe plastik yaitu PETE, HDPE, V, LDPE, PP, PS, OTHER.

Plastik memiliki karakteristik yang cukup unik dimana memiliki daya tahan terhadap biodegradasi dan diperlukan ratusan tahun untuk dapat terurai dengan sempurna. Dengan demikian hal ini menimbulkan adanya penumpukan timbunan sampah plastik di lingkungan dan dapat menimbulkan potensi pencemaran lingkungan (Purwaningrum, 2016). Timbunan plastik yang tidak terkelola dengan baik mau di daratan dapat berpindah ke laut sehingga sangat menimbulkan potensi bahaya bagi hewan-hewan laut dan ekosistem laut. Plastik yang digunakan secara berlebihan dapat menimbulkan penumpukan timbunan sampah plastik yang benar-benar mampu menimbulkan pencemaran lingkungan yang berujung kepada kerusakan lingkungan dan juga mampu mempengaruhi kesehatan manusia. Salah satu cara untuk mengontrol pencemaran lingkungan karena sampah plastik adalah dengan adanya peraturan yang membatasi penggunaan plastik.

1.5.2.10. Kebijakan Pengendalian Plastik

Sampah plastik di lautan dapat membahayakan kesehatan kehidupan makhluk hidup. Studi yang dilakukan oleh LIPI pada tahun 2019 merilis data bahwa perairan Indonesia telah tercemar oleh mikroplastik. Karena permasalahan tersebut, untuk mengurangi penggunaan plastik pemerintah mengeluarkan kebijakan guna mengendalikan jumlah peredaran sampah plastik. Dalam upaya penanganan sampah, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan langkah strategis berupa Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan upaya terhadap target berkurangnya sampah plastik di tahun 2025. Bentuk usaha yang dilakukan adalah dengan menggandeng pihak swasta dan komunitas masyarakat.

Di beberapa daerah Indonesia telah menerapkan peraturan pelarangan penggunaan plastik secara total. Peraturan yang terbit berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota/Bupati. Hanya saja pada pelaksanaan kebijakan baru tersebut terbatas pada penggunaan kantong plastik di sektor ritel dan belum mencakup toko kelontong, warung kecil, dan pasar rakyat.

Di Kota Semarang terdapat regulasi kebijakan dalam menggunakan plastik yang dijelaskan dalam Perwali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Perwali ini dibuat dengan tujuan guna meminimalkan volume, distribusi dan penggunaan plastik secara bijak sehingga dengan perlahan dapat mengurangi sikap bergantung masyarakat terhadap kebutuhan plastik. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah para pelaku usaha dan masyarakat. Pelaku usaha yang

dimaksud meliputi hotel, penjual makanan dan minuman, dan toko modern. Para pelaku yang tercantum tidak diperbolehkan adanya penyediaan kantong berbahan plastik, sedotan berbahan plastik, dan *styrofoam*. Tetapi pelaku usaha dapat menggantinya dengan penyediaan kantong ramah lingkungan, produk sedotan minuman, dan pembungkus makanan yang lebih sadar lingkungan.

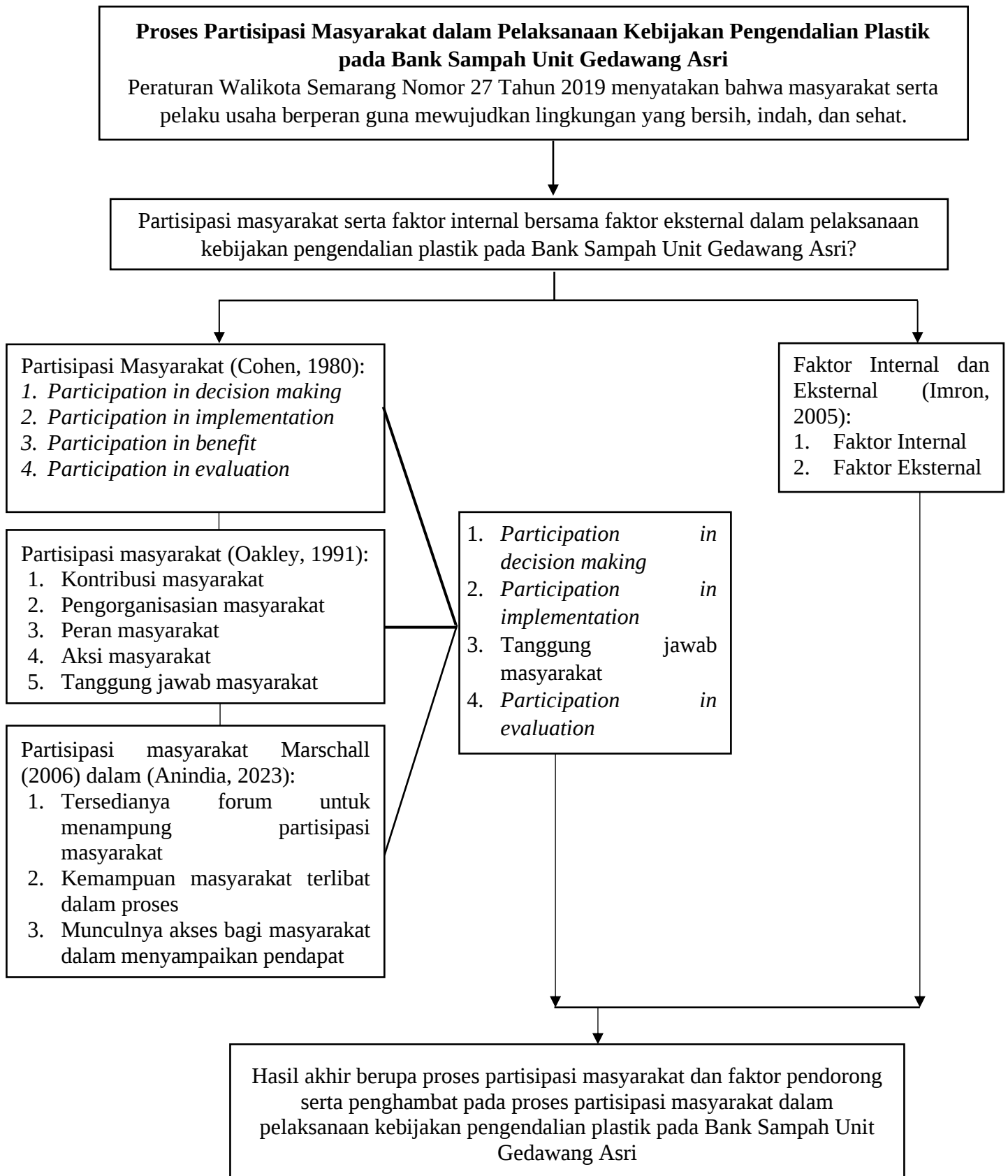
1.6. Kerangka Pemikiran

Tabel 1. 5. Grand Theory

Cohen dan Uphoff (1980)	Oakley (1991)	Marschall (2006) dalam (Anindia, 2023)	Peneliti
1. <i>Participation in decision making</i> 2. <i>Participation in implementation</i> 3. <i>Participation in benefit</i> 4. <i>Participation in evaluation</i>	1. Kontribusi masyarakat 2. Pengorganisasian masyarakat 3. Peran masyarakat 4. Aksi masyarakat 5. Tanggung jawab masyarakat	1. Tersedianya forum untuk menampung partisipasi masyarakat 2. Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan 3. Munculnya akses bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat	1. <i>Participation in decision making</i> 2. <i>Participation in implementation</i> 3. Tanggung jawab masyarakat 4. <i>Participation in evaluation</i>

Sumber: Diolah peneliti (2024)

Tabel 1. 6. Kerangka Berpikir



1.7. Operasionalisasi Konsep

Guna mempermudah peneliti dalam menganalisis dan mengamati hasil penelitian serta mempermudah peneliti dalam hal-hal yang akan di wawancara, maka diperlukan operasionalisasi konsep. Dipaparkan operasionalisasi konsep dalam penelitian sebagai berikut.

Tabel 1. 7. Operasionalisasi Konsep

Fenomena	Indikator	Aspek yang Diamati
Proses Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri	<i>Participation in decision making</i>	a. Sumbangan gagasan, pendapat, atau buah pikir masyarakat dalam permasalahan bank sampah Gedawang Asri b. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan c. Kehadiran masyarakat dalam diskusi atau rapat perencanaan program kerja bank sampah Gedawang Asri
	<i>Participation in implementation</i>	a. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur untuk membangun layanan bank sampah di Kelurahan Gedawang. b. Sumbangan masyarakat berupa uang atau dana selama pelaksanaan program kerja bank sampah Gedawang Asri c. Keterlibatan peran organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, OPD, serta pihak swasta

Fenomena	Indikator	Aspek yang Diamati
		dalam proses pelaksanaan program kerja
	Tanggung jawab masyarakat	a. Kesadaran seluruh masyarakat untuk peduli dengan masalah sampah di Kelurahan Gedawang. b. Kontribusi dari masyarakat setempat terhadap lingkungan sebagai bentuk pertanggung jawaban c. Dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan yang bermanfaat di bank sampah Gedawang Asri
	<i>Participation in evaluation</i>	a. Proses evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik di bank sampah Gedawang Asri b. Kehadiran masyarakat dalam rapat evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian plastik di bank sampah Gedawang Asri c. Penilaian masyarakat terhadap ketercapaian tujuan program bank sampah unit Gedawang Asri
Faktor pendorong dan penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan	Faktor internal	a. Sumbangan masyarakat dalam bentuk pengetahuan dan <i>skill</i> dalam pengelolaan sampah plastik pada bank sampah Gedawang Asri b. Keinginan masyarakat melakukan partisipasi pada pengelolaan

Fenomena	Indikator	Aspek yang Diamati
Pengendalian Plastik pada Bank Sampah Unit Gedawang Asri		sampah plastik di bank sampah Gedawang Asri c. Tingkat pendidikan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik d. Pekerjaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik e. Jenis kelamin terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik
	Faktor eksternal	a. Ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah plastik pada bank sampah Gedawang Asri b. Dukungan dari pemerintah Kota Semarang dan tokoh masyarakat sekitar c. Kualitas pengelola bank sampah Gedawang Asri d. Media massa terhadap partisipasi masyarakat dan opini terkait bank sampah Gedawang Asri

1.8. Argumen Penelitian

Diketahui jumlah penduduk masyarakat di Kota Semarang telah mencapai 1.6 juta jiwa dan akan terus meningkat sehingga menyebabkan penuntutan infrastruktur sarana dan prasarana. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya peningkatan usaha sejenis industri, rumah makan, rumah modern, pasar

tradisional, dan hotel yang akan menimbulkan beberapa permasalahan yang salah satunya permasalahan mengenai sampah. Timbulan sampah di Kota Semarang diramalkan akan mengalami kenaikan bersamaan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Semarang. Berdasarkan data yang diperoleh, timbulan sampah terbanyak bersumber dari sampah sisa makanan serta sampah plastik. Sampah plastik akan menjadi permasalahan serius dikarenakan plastik merupakan benda yang sangat sulit diurai oleh alam dan membutuhkan ratusan tahun untuk terurai.

Seriusnya permasalahan sampah plastik yang muncul di Kota Semarang, pemerintah mengeluarkan regulasi atau kebijakan melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 dalam rangka membangkitkan kesadaran masyarakat guna mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat sehingga dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat serta pelaku usaha. Namun berdasarkan fakta lapangan, kebijakan tersebut tidak berjalan dengan semestinya sebab masih dijumpai para pelaku usaha serta masyarakat yang memakai kantong plastik dalam kegiatan setiap hari, pipet minum berbahan plastik, dan *styrofoam* yang diberikan kepada konsumen. Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang diawasi langsung oleh Pemerintah Kota Semarang dinilai kurang tegas terhadap pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan sanksi yang berupa teguran tertulis. Selain itu kurangnya kesadaran diri dari masyarakat juga menjadi salah satu penyebab permasalahan plastik di Kota Semarang.

Upaya pengelolaan sampah salah satunya dapat diwujudkan melalui bank sampah sebagai upaya pengolahan sampah berbasis partisipasi masyarakat. Salah satunya bank sampah yang berada di Kota Semarang yakni Bank Sampah Unit Gedawang Asri di Tejosari 2, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik. Namun, partisipasi

masyarakat terhadap pengelolaan sampah di Bank Sampah Unit Gedawang masih terindikasi rendah. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (*decision making*), implementasi (*implementation*), tanggung jawab masyarakat dan evaluasi (*evaluation*) masih rendah. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui bank sampah erat kaitannya dengan faktor pendorong dan penghambat yang berasal dari internal (pengetahuan dan keahlian, keinginan dalam diri masyarakat itu sendiri, pekerjaan, pendidikan, dan jenis kelamin) dan eksternal (ketersediaan fasilitas atau sarana prasarana, dukungan dari pemerintah serta tokoh masyarakat, pengelola bank sampah, dan media massa), serta upaya dan usaha yang akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Dalam buku Sugiyono yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa metode yakni suatu langkah ilmiah dalam mendapatkan data yang tujuan serta pengaplikasiannya secara tertentu. Berdasarkan dari definisi tersebut juga diperoleh 4 (empat) kunci yang diantaranya ilmiah, data, tujuan serta kegunaan.

Langkah ilmiah dapat didefinisikan sebagai aktivitas dalam melangsungkan penelitian yang berdasarkan kriteria secara keilmuan yang terdiri dari rasional, empiris, dan sistematis. Rasional diartikan sebagai kegiatan yang dimana melakukan penelitian dengan lebih rasional sehingga lebih mudah dipahami oleh manusia dengan melakukan pengamatan untuk mengetahui prosedurnya. Sedangkan definisi dari sistematis adalah

upaya dalam melakukan penelitian dalam menerapkan sejumlah prosedur yang bersifat logis (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian yang diterapkan, desain penelitian ini menerapkan penelitian kualitatif deskriptif yang tentunya penelitian ini akan mendapatkan data-data yang berupa deskriptif maupun dalam bentuk tulisan atau lisan (tidak menggunakan angka atau statistika) yang dimana data-data tersebut dilihat berkaitan dengan keterangan yang dinyatakan oleh pihak-pihak yang diamati. Dengan menerapkan metode kualitatif, penelitian ini dilaksanakan dengan alamiah sehingga hasil yang diperoleh dapat menunjukkan data-data yang peneliti temukan melalui observasi.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian yakni lokasi ataupun tempat penelitian berlangsung. Informasi-informasi yang terkait guna data dapat diketahui di situs penelitian (Wiratna Sujarweni, 2014). Penetapan dari lokasi penelitian ini merupakan langkah terpenting pada saat melangsungkan penelitian dengan tipe penelitian kualitatif. Situs pada penelitian ini adalah Bank Sampah Unit Gedawang Asri yang berada di alamat Tejosari 2, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan fokus dan lokus tentang permasalahan penelitian yaitu berkaitan dengan proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang di Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan hal penting pada saat penelitian berlangsung. Subjek penelitian atau informan merupakan seseorang ataupun sekelompok orang yang akan diminta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu fakta ataupun pendapat

pribadi dari seseorang tersebut. Adapun teknik dari penentuan informan yang akan dipakai pada penelitian yakni menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2014) yakni teknik pengambilan sampel sumber data-data dengan adanya penilaian tertentu dan informan mengetahui apa penulis harapkan. Teknik ini dimaksudkan untuk memperoleh informan kunci yang akan menjadi narasumber penelitian. Adapun informan pada penelitian ini antara lain:

1. DLH Kota Semarang meliputi:
 - a. Kepala Sie Bidang IV Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan
 - b. Pendamping Bank Sampah
2. Masyarakat meliputi:
 - a. Ketua Bank Sampah Unit Gedawang Asri
 - b. Pengurus Bank Sampah Unit Gedawang Asri
 - c. Nasabah Bank Sampah Unit Gedawang Asri

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data pada metode penelitian yang telah dipilih berupa data kualitatif seperti kata-kata, kalimat, frasa-frasa, simbol-simbol tertentu serta fakta-fakta yang dapat mempresentasikan atau menggambarkan perilaku atau tindakan seseorang serta peristiwa-peristiwa sosial lainnya khususnya berkaitan dengan proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang di Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

1.9.5. Sumber Data

Sumber data yakni segala sesuatu yang bisa menyampaikan informasi terkait penelitian pada saat dilangsungkan. Pada penelitian kualitatif, sumber data utama berasal

dari kata-kata, perilaku/tindakan, sedangkan sumber data yang berasal dari dokumen, laporan serta lain sebagainya menjadi data pendukung. Adapun sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer ialah data-data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Sumber data ini didapatkan melalui informan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik dari pengamatan secara langsung maupun dari hasil *in depth interview* atau wawancara mendalam antara peneliti bersama narasumber. Data primer pada penelitian ini didapatkan melalui wawancara bersama pihak-pihak yang mengetahui tentang proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Selain itu, peneliti juga memperoleh data dengan cara observasi pada lokasi penelitian yaitu Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara tidak langsung. Umumnya data-data ini diperoleh dari berbagai arsip, dokumen, jurnal, artikel dan informasi baik itu media elektronik ataupun media cetak. Sumber bacaan pada penelitian yang dilakukan yaitu semua hal yang berhubungan terhadap proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan plastik pada Bank Sampah dan beberapa bacaan lainnya yang masih berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah kegiatan fundamental pada penelitian, dimana peneliti berusaha mengumpulkan berbagai data sebanyak mungkin untuk kemudian diproses menjadi sebuah informasi yang berguna untuk penelitian. Penelitian ini menerapkan beberapa teknik-teknik pengumpulan data yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah proses mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian melalui aktivitas bertanya jawab secara langsung antara peneliti bersama narasumber dengan ataupun tanpa memakai *interview guide*/pedoman wawancara (Sugiyono, 2012). Wawancara bertujuan untuk memperoleh data maupun informasi yang nantinya dapat dipakai untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif wawancara dilaksanakan secara mendalam (*in depth interview*) terhadap subjek penelitian berkaitan dengan proses partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kebijakan pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang melalui Bank Sampah Unit Gedawang Asri.

2. Observasi

Observasi ialah satu diantara dari teknik pengumpulan data melalui pengamatan dari sisi peneliti melalui panca indra. Pada pengumpulan data ini dilaksanakan dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian tanpa melakukan komunikasi (Sugiyono, 2012). Teknik ini mempunyai 2 (dua) jenis observasi diantaranya observasi partisipan serta observasi non-

partisipan. Observasi partisipan merupakan pengumpulan data dimana peneliti merasakan atau ikut langsung terhadap kegiatan yang akan diamatinya sedangkan observasi non-partisipan yaitu pengumpulan data dimana peneliti hanya melakukan pengamatan biasa saja tanpa ikut berpartisipasi terhadap objek yang diamatinya. Penelitian ini akan menggunakan teknik observasi non-partisipan secara terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan kejadian-kejadian lalu yang berupa tulisan, gambar, maupun hasil karya tertentu (Sugiyono, 2012). Pada penelitian kualitatif, studi dokumen digunakan sebagai pendukung data dari teknik pengumpulan data sebelumnya yakni wawancara serta observasi. Pada penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data-data berupa dokumen, arsip maupun laporan yang belum didapatkan dari metode sebelumnya untuk dikaji secara mendalam sebagai tambahan bukti atas suatu peristiwa. Pengambilan data juga dilakukan dengan mengambil foto-foto di lokasi penelitian.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari serta merencanakan dengan tersistem dan data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi melalui cara mengimplementasikan data-data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melaksanakan sintesa, membentuk ke dalam pola, meninjau mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta melakukan kesimpulan agar ringan dipahami.

Analisis data terhadap penelitian kualitatif mulai dilaksanakan sebelum, saat dan setelah pengumpulan data pada saat dilapangan. Analisis data kualitatif adalah usaha yang dilaksanakan oleh peneliti melalui pengolahan data untuk menemukan pola tertentu maupun hal penting lainnya yang nantinya akan dipaparkan dalam hasil penelitian (Moleong, 2018). Jadi data penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dikelola sehingga akan ringan dipahami oleh peneliti ataupun pembacanya.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) memaparkan analisis data kualitatif yang dilaksanakan interaktif serta berlangsung secara teratur hingga tuntas dan data tersebut sudah jenuh. Kegiatan pada teknik analisis data terdiri dari tiga hal utama diantaranya reduksi data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data yakni aktivitas analisis dengan maksud mendalami, memfokuskan, menentukan, menyusun data sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi yang sangat berguna bagi penelitian. Pada tahap reduksi data, data didapatkan dari tempat penelitian akan dimasukan pada uraian laporan penelitian secara lengkap dan rinci. Reduksi data ini dilakukan secara berkesinambungan hingga berakhirnya laporan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah aktivitas menyusun hasil penelitian dari kumpulan data yang telah diperoleh agar mudah dimengerti dan dipahami. Penyajian data pada penelitian kualitatif ini dapat dilaksanakan melalui penjelasan berupa teks, bagan, *flowchart*, pola hubungan tertentu dan sebagainya.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan adalah verifikasi data yang dilaksanakan secara teratur selama kegiatan penelitian berlangsung. Kesimpulan menjadi tahapan terakhir pada kegiatan analisis dari data kualitatif. Penarikan kesimpulan juga bertujuan untuk menggali maksud dari data-data yang diperoleh maupun mencari hubungan persamaan hingga perbedaan dari data yang didapatkan dan fakta yang terjadi di Bank Sampah Unit Gedawang Asri. Penarikan kesimpulan ini juga diambil dari intisari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1.9.8. Kualitas Data

Proses kerja ilmiah harus melewati uji coba guna mendapatkan data-data yang sesuai terhadap realitas di lokasi penelitian. Pada penelitian kualitatif untuk menguji kualitas data dilaksanakan dengan cara triangulasi. Triangulasi yakni teknik pengumpulan data-data yang dilaksanakan untuk mengecek keabsahan data berdasarkan pemanfaatan beberapa teknik pengumpulan data lainnya sehingga hasil penelitian dapat dipercaya. Pengujian kualitas data dengan menggunakan triangulasi menjadi hal penting dalam penelitian kualitatif meskipun membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang lebih. Melalui triangulasi akan meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti mengenai fenomena yang akan diteliti. Pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi menurut Sugiyono (Sugiyono, 2012) dilakukan melalui cara sebagai berikut.

1. Triangulasi teknik yakni pengujian data yang menggunakan pengumpulan data yang beragam guna memperoleh data yang sama. Dalam triangulasi teknik, data yang diperoleh berdasarkan metode tertentu akan dicek dengan

metode yang lain. Selain itu, dengan melakukan penggabungan teknik pengumpulan data, peneliti akan lebih mudah mendapatkan informan yang lebih banyak sehingga mempermudah dalam hal analisis perbandingan.

2. Triangulasi sumber merupakan pengujian kredibilitas melalui pengujian yang berulang dengan melewati berbagai sumber. Hal ini bermakna bahwa dalam penelitian yang kredibel, penelitian kualitatif harus dilengkapi dengan data-data yang memiliki asal dari dokumen-dokumen yang diantaranya laporan bulanan, laporan tahunan, notulen, rapat, catatan lapangan atau jurnal harian peneliti. Dengan ini, peneliti dapat membandingkan hasil informasi yang didapatkan dari berbagai sumber yang didapatkan.
3. Triangulasi waktu merupakan pengujian data yang dihasilkan dari pelaksanaan waktu yang berbeda-beda. Misal data yang dihasilkan dari hasil wawancara narasumber yang sama namun dengan pelaksanaan waktu yang berbeda-beda.

Penelitian ini menerapkan triangulasi yang dimana triangulasi teknik dan sumber guna menarik kesimpulan-kesimpulan dari data penelitian yang dilaksanakan.